



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Peniadaan Layanan TJ Koridor 1 Dinilai Tak Tepat

## ○ Dishub Harus Pahami Karakter Pelanggan

**JAKARTA (Poskota)** - Pengamat Transporstasi, Darmaningtyas menilai wacana peniadaan layanan Transjakarta (TJ) koridor 1 (Blok M-Kota) tidak tepat. Apalagi alasan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang ingin meniadakan layanan TJ koridor 1 dengan alasan mengurangi tumpang tindak layanan.

"Kalau memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TJ tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan tersebut," kata Darmaningtyas dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12).

Menurutnya, Karakter pelanggan TJ berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek social ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya, sehingga tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute.

"Dari aspek social ekonomi, pelanggan MRT memiliki kelas social ekonomi yang lebih tinggi, terlihat dari penampilan fisiknya yang lebih glowing, jenis pakaiannya yang rata-rata bermerk, farfum yang digunakan, maupun tentengan tasnya. Sangat jarang (boleh dikatakan tidak pernah terlihat sama sekali) pelanggan MRT menenteng tas plastik (tas kresek) atau kardus. Tapi terlalu mudah menemukan pelanggan TJ membawa tentengan tas kresek atau kardus," jelasnya.

Kemudian dari segi tarif, tarif MRT jelas jauh lebih mahal karena berdasarkan jarak tempuh. Darmaningtyas mencontohkan seperti jarak Lebak Bulus – Bunderan HI yang tarifnya mencapai Rp14.000, sementara naik TJ hanya Rp 3.500. "Seandainya pada tahun 2027 nanti tarif TJ naik menjadi Rp5.000,- akan tetap jauh lebih murah dibandingkan tarif MRT dari Lebak Bulus sampai Kota yang mungkin bisa mencapai Rp30.000,-. Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil

pribadi," jelasnya.

Menurutnya, Disdhub DKI Jakarta harus merubah cara berpikir, yaitu bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum khususnya MRT. Bukan justru menghapus layanan TJ koridor 1.

"Kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dari 15 tahun digodok dan dikaji, seperti misalnya tarif parkir tengah kota yang mahal, tidak boleh parkir di badan jalan, dan harga BBM untuk kendaraan pribadi yang mahal, saatnya untuk diimplementasikan," tuturnya.

"Kalau menghapus layanan Koridor 1 jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan Pembangunan MRT itu sendiri yang sejak diwacanakan untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi, bukan memindahkan pengguna angkutan umum lainnya," tambah Darmaningtyas.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengaku belum berbicara dengan Pemprov Jakarta soal wacana penghapusan koridor satu dan dua Transjakarta tersebut. Namun, pengoperasian transportasi publik di Jakarta, memang merupakan kebijakan Pemprov Jakarta. "Tentunya kami tetap memperhatikan beberapa masukan dan saran para stakeholder, diantaranya adalah para pelanggan Transjakarta yang setiap hari menggunakan layanan," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakartam Ayu Wardhani kepada Poskota, Sabtu (21/12).

Ayu menyebut, koridor satu dan dua yang bakal diadakan itu memiliki pelanggan hingga puluhan ribu setiap harinya. Adapun koridor satu dengan rute Blok M-Kota memiliki 65-70 penumpang per hari. Sementara itu, koridor dua dengan rute Pulo Gadung ke Harmoni sebanyak 37-41 penumpang per hari. "Angka itu catatan sepanjang tahun 2024," ujar Ayu. (Pan)